

**EKOFEMINISME DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DUSUN
TINJALAS, DESA SERAYA TIMUR: REPRESENTASI KEADILAN
LINGKUNGAN DAN KESETARAAN GENDER**

I Made Mardika

Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

**mademardika@warmadewa.ac.id*

Anak Agung Ayu Dewi Larantika

Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

agungdewilarantika@warmadewa.ac.id

Leoneto Madeira Martins

Universidade Da Paz, Dili, Timor Leste

*martins2013@yahoo.co.id***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis wacana ekofeminisme dalam merepresentasikan keadilan lingkungan dan kesetaraan gender pada pengelolaan air bersih di pedesaan miskin di Provinsi Bali, dengan fokus pada peran perempuan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Pendekatan penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan berlandaskan teori ekofeminisme kontemporer. Lokasi penelitian berada di Dusun Tinjalas, Desa Seraya, Bali, dengan sampel sebanyak 20 kepala keluarga yang dipilih secara acak sederhana. Data dikumpulkan melalui wawancara kelompok terstruktur dan terfokus serta observasi nonpartisipan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan berperan dominan dalam mengakses, memanfaatkan, dan mengelola air bersih secara efisien, termasuk memanfaatkan sumber mata air, sungai, serta menampung air hujan sebagai strategi adaptasi terhadap keterbatasan air. Keterlibatan laki-laki dalam aktivitas tersebut relatif rendah, meskipun relasi gender dalam keluarga tidak memperlihatkan konflik atau dikotomi yang mencolok. Perempuan juga menunjukkan kesadaran ekologis melalui penggunaan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengolah air hingga layak konsumsi untuk mencegah penyakit. Temuan ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi strategis dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan air bersih di wilayah pedesaan miskin.

Kata kunci: ekofeminisme; keadilan lingkungan; pengelolaan air bersih

ABSTRACT

This study aims to analyze ecofeminist discourse in representing environmental justice and gender equality in clean water management in impoverished rural areas of Bali Province, with a particular focus on the role of women in sustaining water resources. The study employed a qualitative descriptive approach based on contemporary ecofeminist theory. The research was conducted in Tinjalas Hamlet, Seraya Village, Bali, involving a sample of 20 households selected through simple random sampling. Data were collected through structured and focused group interviews as well as non-participant observation and were analyzed using qualitative descriptive methods. The findings reveal that women play a dominant role in accessing, utilizing, and managing clean water efficiently, including collecting water from springs and rivers and harvesting rainwater as an adaptive strategy to cope with limited water availability. Men's participation in these activities is relatively low, although gender relations within the family do not exhibit significant conflict or dichotomy. Women also demonstrate strong ecological awareness by using water wisely, maintaining environmental cleanliness, and treating water to make it safe for consumption in order

to prevent waterborne diseases. These findings confirm that women make a strategic contribution to promoting environmental justice and ensuring the sustainability of clean water management in impoverished rural communities.

Keywords: *ecofeminism; environmental justice; clean water management*

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya esensial yang menopang keberlangsungan kehidupan manusia, ekosistem, dan pembangunan sosial-ekonomi. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti minum, memasak, sanitasi, dan kebersihan, air juga berperan penting dalam pertanian, industri, kesehatan masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem (Bagayoko et al., 2018; WHO, 2021). Meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk, dan ketimpangan akses telah menjadikan krisis air sebagai salah satu tantangan utama pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur penyediaan air bersih.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kelangkaan air, karena mereka umumnya memikul tanggung jawab utama dalam penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga (Agarwal, 1992; Sultana, 2021). Di banyak komunitas pedesaan, perempuan tidak hanya bertugas memperoleh air, tetapi juga mengelola penggunaannya, menjaga kualitas air, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan domestik keluarga. Posisi tersebut menempatkan perempuan pada hubungan yang sangat erat dengan lingkungan sekaligus menjadikan mereka aktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis penyediaan infrastruktur, tetapi juga sebagai persoalan sosial, budaya, dan gender yang memerlukan pendekatan multidisipliner.

Perspektif ekofeminisme menawarkan kerangka analitis untuk memahami keterkaitan antara eksploitasi lingkungan dan ketidakadilan gender. Ekofeminisme berangkat dari asumsi

bahwa dominasi terhadap alam dan subordinasi terhadap perempuan berkembang melalui struktur sosial yang serupa sehingga upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari penguatan posisi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (Shiva, 1988; Gaard, 2011). Perkembangan teori ekofeminisme kontemporer menunjukkan bahwa hubungan perempuan dengan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai hubungan yang bersifat biologis atau esensialis, tetapi sebagai hasil interaksi antara kondisi material kehidupan, nilai budaya, pengalaman ekologis, serta relasi sosial yang berkembang dalam masyarakat (Alaimo & Hekman, 2008; Harcourt & Nelson, 2015). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam dalam berbagai konteks budaya.

Kajian mengenai peran perempuan dalam pengelolaan air telah berkembang di berbagai negara, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek partisipasi perempuan dalam penyediaan air rumah tangga atau pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Penelitian Towa et al. (2021) menitikberatkan pada aspek manajemen pelayanan air bersih, khususnya perencanaan, pengawasan, dan komunikasi organisasi penyedia layanan air. Prihatiningtyastuti et al. (2020) menunjukkan bahwa perempuan berperan dalam pengelolaan air rumah tangga, tetapi memiliki keterlibatan yang terbatas dalam pengambilan keputusan mengenai distribusi air. Sementara itu, Wismar'ain et al. (2009) menemukan bahwa kontribusi perempuan masih didominasi oleh aktivitas domestik dan belum dianalisis dalam perspektif relasi gender maupun keberlanjutan lingkungan. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa kajian sebelumnya lebih banyak menempatkan perempuan sebagai pengguna atau pengelola air pada tingkat rumah tangga, sedangkan hubungan antara praktik pengelolaan air, relasi gender, dan keadilan ekologis masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya dua kesenjangan penelitian (*research gaps*). Pertama, sebagian besar penelitian belum mengintegrasikan perspektif material ecofeminism, cultural ecofeminism, dan feminist *political ecology* dalam menjelaskan praktik pengelolaan air di tingkat komunitas. Akibatnya, pengalaman perempuan lebih sering dipahami sebagai konsekuensi pembagian kerja domestik daripada sebagai bentuk agensi ekologis yang berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Kedua, penelitian terdahulu umumnya belum mengaitkan praktik pengelolaan air dengan konteks budaya lokal yang membentuk cara masyarakat memaknai hubungan antara manusia dan lingkungan. Padahal, nilai-nilai budaya dapat memengaruhi bagaimana perempuan mengembangkan strategi adaptasi terhadap krisis air sekaligus membangun ketahanan sosial komunitas.

Kesenjangan tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks Dusun Tinj alas, Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, Bali. Dusun ini merupakan wilayah perbukitan yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh air, memanfaatkan air hujan pada musim penghujan, serta menerapkan berbagai strategi penghematan selama musim kemarau. Dalam kondisi tersebut, perempuan memegang peranan utama dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan air bagi kebutuhan keluarga. Pada saat yang sama, masyarakat Bali memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat, khususnya filosofi *Tri Hita Karana* dan konsep *rwa bhineda*, yang memengaruhi cara pandang terhadap hubungan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial. Karakteristik tersebut menjadikan Dusun Tinj alas sebagai konteks yang penting untuk memahami bagaimana praktik pengelolaan air dibentuk oleh interaksi antara kondisi ekologis, budaya lokal, dan relasi gender.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik pengelolaan air bersih di Dusun Tinj alas merepresentasikan hubungan antara perempuan, lingkungan, dan keadilan ekologis dalam perspektif ekofeminisme. Analisis difokuskan pada enam dimensi utama, yaitu inklusivitas lingkungan, relasi gender, peran

perempuan dalam pengelolaan air, dualisme ekologis, pelestarian lingkungan, serta kesehatan lingkungan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, studi ini tidak hanya mendeskripsikan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan air, tetapi juga menafsirkan praktik tersebut melalui integrasi perspektif material ecofeminism, cultural ecofeminism, dan feminist *political ecology*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekofeminisme dalam konteks masyarakat Hindu Bali sekaligus memperkaya diskursus internasional mengenai hubungan antara perempuan, lingkungan, dan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif (*qualitative case study*) untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan air bersih dalam perspektif ekofeminisme pada masyarakat Dusun Tinj alas, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi hubungan antara kondisi ekologis, praktik sosial, budaya lokal, dan relasi gender dalam satu konteks kehidupan masyarakat secara utuh (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Dusun Tinj alas merupakan kawasan perbukitan yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Pada musim hujan masyarakat memanfaatkan air hujan yang ditampung dalam bak penampungan, sedangkan pada musim kemarau mereka bergantung pada pasokan air bersih yang didistribusikan menggunakan mobil tangki atau mengambil air dari sumber mata air yang berjarak sekitar 2–3 kilo meter dari permukiman. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menerapkan berbagai strategi penghematan air dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik ekologis tersebut menjadikan Dusun Tinj alas sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara kelangkaan air, relasi gender, dan praktik pengelolaan sumber daya air.

Unit analisis penelitian adalah rumah tangga yang menetap di Dusun Tinj alas. Berdasarkan daftar kepala keluarga yang

diperoleh dari pemerintah dusun, dipilih 20 rumah tangga menggunakan teknik *simple random sampling*. Meskipun penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas, pemilihannya tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk mengurangi bias pemilihan partisipan dan memperoleh variasi pengalaman pengelolaan air dalam masyarakat (Maxwell, 2013). Seluruh partisipan telah menetap di lokasi penelitian lebih dari lima tahun dan memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan kebutuhan air rumah tangga.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion* / FGD), dan observasi nonpartisipan. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman partisipan mengenai strategi memperoleh dan memanfaatkan air, pembagian kerja domestik, pengambilan keputusan dalam rumah tangga, serta pandangan mereka mengenai pelestarian lingkungan. FGD digunakan untuk mengonfirmasi pola-pola sosial yang berkembang pada tingkat komunitas. Observasi dilakukan untuk mendokumentasikan aktivitas masyarakat dalam memperoleh, menyimpan, menggunakan, dan menghemat air, termasuk kondisi fisik lingkungan dan infrastruktur penyediaan air.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan enam dimensi analisis ekofeminisme, yaitu (1) inklusivitas lingkungan, (2) relasi gender, (3) peran perempuan dalam pengelolaan air, (4) dualisme ekologis, (5) pelestarian lingkungan, dan (6) kesehatan lingkungan. Pedoman wawancara dan observasi terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pakar metodologi penelitian kualitatif dan kajian lingkungan untuk memperoleh validitas isi, kemudian diuji coba secara terbatas sebelum digunakan dalam penelitian lapangan.

Analisis data menggunakan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2021). Proses analisis dilakukan melalui enam tahap, yaitu: (1) mentranskripsikan dan membaca ulang seluruh data, (2) melakukan open coding terhadap unit-unit makna, (3) mengelompokkan kode menjadi kategori konseptual, (4) menyusun tema-tema utama berdasarkan perspektif ekofeminisme, (5) menelaah kembali

konsistensi tema terhadap keseluruhan data, dan (6) menginterpretasikan hubungan antartema untuk menjelaskan praktik pengelolaan air bersih masyarakat Dusun Tinjelas. Seluruh proses pengodean dilakukan secara manual melalui pembacaan berulang agar interpretasi yang dihasilkan konsisten dengan pengalaman partisipan.

Keabsahan data dijaga melalui beberapa strategi untuk meningkatkan *credibility*, *dependability*, dan *confirmability* penelitian (Lincoln & Guba, 1985). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, FGD, dan observasi, serta informasi yang diperoleh dari kepala keluarga laki-laki dan perempuan, tokoh masyarakat, serta aparat desa. Selain itu, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara kepada beberapa informan utama, sedangkan diskusi dengan rekan sejawat digunakan untuk menguji konsistensi interpretasi selama proses analisis. Seluruh proses penelitian didokumentasikan sebagai *audit trail* sehingga dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

Temuan penelitian diinterpretasikan menggunakan perspektif *material ecofeminism*, *cultural ecofeminism*, dan *feminist political ecology* untuk menjelaskan hubungan antara kelangkaan air, relasi gender, praktik pengelolaan sumber daya air, serta keberlanjutan lingkungan dalam kehidupan masyarakat Dusun Tinjelas.

PEMBAHASAN

Ekofeminisme dan Pengelolaan Air Bersih dalam Konteks Krisis Ekologi Pedesaan

Kelangkaan air bersih di Dusun Tinjelas merupakan persoalan ekologis yang sekaligus mencerminkan dinamika sosial dan gender dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Kondisi geografis berupa wilayah perbukitan dengan akses terbatas terhadap sumber air mengharuskan masyarakat mengembangkan berbagai strategi adaptasi agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Dalam situasi tersebut, perempuan menjadi aktor utama yang memperoleh, mengelola, mendistribusikan, dan menghemat penggunaan air. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan air tidak sekadar merupakan aktivitas domestik, tetapi merupakan praktik sosial-ekologis yang

menopang keberlanjutan kehidupan keluarga dan komunitas.

Perspektif material ecofeminism memberikan kerangka analitis yang relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Aliran ini menolak pandangan esensialis yang menganggap perempuan secara kodrati lebih dekat dengan alam, dan sebaliknya menegaskan bahwa hubungan tersebut dibentuk oleh kondisi material kehidupan sehari-hari (Alaimo & Hekman, 2008). Dalam konteks Dusun Tinjelas, kedekatan perempuan dengan sumber daya air lahir dari tanggung jawab reproduktif yang menempatkan mereka sebagai pihak yang paling sering berinteraksi dengan kebutuhan dasar rumah tangga. Aktivitas memperoleh air, mengatur distribusi penggunaannya, hingga memastikan kecukupan air bagi konsumsi, sanitasi, dan kegiatan keagamaan merupakan bentuk kerja reproduktif yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan ekologis. Dengan demikian, relasi perempuan dengan lingkungan tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi biologis, melainkan sebagai hasil interaksi antara kondisi lingkungan, pembagian kerja domestik, dan kebutuhan mempertahankan keberlangsungan keluarga.

Interpretasi tersebut memperluas pemahaman mengenai ekofeminisme dalam konteks pedesaan Indonesia. Berbeda dengan pendekatan awal yang lebih menekankan hubungan simbolik antara perempuan dan alam (Shiva, 1988), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ekologis perempuan lebih tepat dipahami sebagai strategi adaptif yang lahir dari pengalaman material menghadapi krisis air. Pengalaman tersebut menghasilkan pengetahuan ekologis (*ecological knowledge*) yang diperoleh melalui praktik sehari-hari, seperti menentukan prioritas penggunaan air, memanfaatkan air hujan selama musim penghujan, serta menerapkan pola konsumsi yang hemat selama musim kemarau. Pengetahuan tersebut berkembang melalui pengalaman kolektif dan diwariskan antargenerasi sehingga menjadi bagian dari mekanisme adaptasi masyarakat terhadap tekanan lingkungan.

Foto 1. Penyaluran Air Bersih dengan Mobil Tangki



Sumber: lentera 3, 2021

Di sisi lain, praktik pengelolaan air di Dusun Tinjelas juga memperlihatkan karakteristik cultural ecofeminism, yaitu hubungan antara perempuan dan lingkungan yang dibentuk melalui nilai budaya dan spiritualitas masyarakat (Gaard, 2011). Dalam masyarakat Hindu Bali, air tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai unsur sakral yang menopang kehidupan dan pelaksanaan berbagai ritual keagamaan. Filosofi Tri Hita Karana menempatkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai landasan kehidupan bersama, sedangkan konsep *rwa bhineda* mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan berbagai peran sosial. Nilai-nilai tersebut membentuk etika ekologis yang mendorong masyarakat menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan sumber mata air, dan menghindari eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Dalam konteks ini, perempuan berperan sebagai agen budaya yang mentransmisikan nilai konservasi kepada anggota keluarga melalui praktik keseharian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi material dan budaya tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk praktik pengelolaan air. Strategi penghematan air yang dilakukan perempuan bukan hanya didorong oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh keyakinan bahwa menjaga air merupakan bagian dari tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Dengan demikian, konservasi air berkembang sebagai praktik sosial yang mengintegrasikan kebutuhan pragmatis dengan nilai-nilai budaya lokal. Sintesis ini memperlihatkan bahwa praktik ekofeminisme di Dusun Tinjelas memiliki karakter

kontekstual yang berbeda dengan berbagai bentuk gerakan lingkungan yang berkembang di negara lain.

Perbandingan dengan penelitian internasional semakin menegaskan kekhasan tersebut. Penelitian Agarwal (1992) di India menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh degradasi lingkungan karena memikul tanggung jawab terhadap penyediaan air dan pangan rumah tangga. Nightingale (2011) di Nepal juga menemukan bahwa pengalaman sehari-hari perempuan menghasilkan pengetahuan ekologis yang lebih mendalam dibandingkan laki-laki, sehingga mereka berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, Sultana (2021) menegaskan bahwa krisis air di negara-negara berkembang memperbesar beban kerja perempuan sekaligus memperlihatkan ketimpangan akses terhadap sumber daya.

Meskipun memiliki kesamaan dalam hal dominasi perempuan pada pengelolaan air, konteks Dusun Tinjalias memperlihatkan karakteristik yang berbeda. Di India dan Nepal, keterlibatan perempuan sering kali berkembang melalui gerakan kolektif untuk memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya alam. Sebaliknya, perempuan di Dusun Tinjalias lebih banyak membangun strategi adaptasi melalui pengelolaan air pada tingkat rumah tangga dan komunitas tanpa menampilkan bentuk resistensi terbuka terhadap struktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekofeminisme tidak selalu diwujudkan dalam bentuk gerakan politik, tetapi juga dapat berkembang melalui tindakan keseharian yang menjaga keberlanjutan kehidupan keluarga dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Harcourt dan Nelson (2015) yang menekankan bahwa pengalaman ekologis perempuan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing komunitas.

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan air di Dusun Tinjalias lebih tepat dipahami sebagai bentuk ekofeminisme kontekstual, yaitu praktik yang dibangun melalui interaksi antara kondisi material, nilai budaya, dan pengalaman ekologis masyarakat. Perspektif ini melampaui dikotomi antara material ecofeminism dan cultural ecofeminism

karena menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan perempuan dengan lingkungan. Di satu sisi, pengalaman material akibat kelangkaan air membentuk strategi adaptasi perempuan, sedangkan di sisi lain nilai-nilai budaya dan spiritual memperkuat etika konservasi yang menopang keberlanjutan sumber daya air.

Temuan penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian mengenai pengelolaan air berbasis komunitas, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekofeminisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik konservasi air pada masyarakat pedesaan Bali tidak dapat dijelaskan hanya melalui perspektif dominasi patriarki ataupun kedekatan simbolik perempuan dengan alam. Sebaliknya, hubungan tersebut merupakan hasil interaksi yang dinamis antara kondisi ekologis, pengalaman material, nilai budaya, dan praktik sosial yang membentuk strategi keberlanjutan masyarakat dalam menghadapi krisis air. Temuan ini memperluas diskursus ekofeminisme dengan menghadirkan perspektif dari masyarakat Hindu Bali, sehingga memperkaya literatur internasional yang selama ini lebih banyak didasarkan pada pengalaman komunitas di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin.

Foto 2. Jalan Terjal dan Berliku dalam Pengambilan Air Bersih



Sumber: detikBali, 2023

Agensi Perempuan dan Ketahanan Air Rumah Tangga: Perspektif Feminist Political Ecology

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Dusun Tinjalias tidak hanya berperan sebagai pengguna air, tetapi juga sebagai aktor utama yang mengelola seluruh siklus pemanfaatan air dalam rumah tangga.

Perempuan bertanggung jawab memperoleh air dari sumber yang terbatas, menyimpan dan mendistribusikannya sesuai prioritas kebutuhan, mengembangkan strategi penghematan, serta memastikan ketersediaan air untuk konsumsi, sanitasi, dan kegiatan keagamaan. Peran tersebut menempatkan perempuan sebagai pengelola utama ketahanan air rumah tangga (*household water security*), yaitu kemampuan keluarga mempertahankan akses terhadap air yang memadai untuk menunjang keberlangsungan kehidupan sehari-hari di tengah keterbatasan sumber daya.

Dalam perspektif *Feminist Political Ecology* (FPE), pengelolaan sumber daya alam dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi ekologis, struktur sosial, pembagian kerja berbasis gender, dan relasi kekuasaan (Rocheleau et al., 1996). Perspektif ini menekankan bahwa perempuan dan laki-laki mengalami dampak perubahan lingkungan secara berbeda karena memiliki tanggung jawab, akses, dan pengalaman yang tidak sama terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan air di Dusun Tinjelas tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas domestik, tetapi juga sebagai praktik politik-ekologis yang menentukan keberlangsungan sistem sosial pada tingkat rumah tangga dan komunitas.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kapasitas perempuan dalam mengelola air dibangun melalui pengalaman sehari-hari yang menghasilkan pengetahuan ekologis (*ecological knowledge*) mengenai pola ketersediaan air, teknik penyimpanan, prioritas penggunaan, serta strategi adaptasi pada musim kemarau. Pengetahuan tersebut berkembang bukan melalui pendidikan formal, melainkan melalui proses belajar antargenerasi yang berlangsung dalam kehidupan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak sekadar menjalankan tugas domestik, tetapi juga memproduksi dan mentransmisikan pengetahuan yang menjadi dasar ketahanan rumah tangga dalam menghadapi krisis air. Dengan demikian, perempuan memiliki agensi ekologis (*ecological agency*), yaitu kapasitas untuk mengambil keputusan, mengembangkan strategi adaptasi, dan memengaruhi praktik pengelolaan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep agensi dalam penelitian ini berbeda dari pemahaman yang mengidentikkan agensi dengan bentuk perlawanan terbuka terhadap struktur sosial. Agensi perempuan di Dusun Tinjelas justru tampak dalam kemampuan mereka mengorganisasi penggunaan air secara efisien, membangun kebiasaan hemat air di lingkungan keluarga, serta menyesuaikan pola konsumsi dengan perubahan musim. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa perempuan secara aktif membentuk strategi keberlanjutan rumah tangga melalui tindakan sehari-hari. Dengan demikian, agensi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk resistensi terhadap struktur patriarki, tetapi juga melalui kemampuan mengelola keterbatasan ekologis dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Temuan ini memperkuat pandangan Harcourt dan Nelson (2015) yang menyatakan bahwa perempuan merupakan aktor penting dalam tata kelola lingkungan karena pengalaman hidup mereka menghasilkan pengetahuan yang berbeda dari perspektif teknokratis. Pengetahuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga mencakup kemampuan membangun solidaritas sosial, mengatur distribusi sumber daya, dan merespons perubahan lingkungan secara adaptif. Dalam konteks Dusun Tinjelas, kapasitas tersebut tercermin pada kemampuan perempuan menentukan prioritas penggunaan air ketika pasokan terbatas, memanfaatkan air hujan sebagai cadangan, serta mengurangi pemborosan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar keluarga.

Meskipun demikian, perspektif FPE juga mengingatkan bahwa tingginya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali berkaitan dengan kerja reproduktif (*reproductive labour*) yang kurang memperoleh pengakuan sosial maupun ekonomi. Fraser (2016) menjelaskan bahwa pekerjaan reproduktif, seperti menyediakan air, menyiapkan makanan, menjaga kebersihan, dan merawat anggota keluarga, merupakan fondasi yang menopang keberlangsungan sistem sosial, meskipun sering kali tidak dipandang sebagai pekerjaan produktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Dusun Tinjelas memikul

tanggung jawab memperoleh air sekaligus menjalankan berbagai aktivitas domestik lainnya. Dengan demikian, ketahanan air rumah tangga sesungguhnya dibangun melalui kontribusi kerja perempuan yang sebagian besar berlangsung di ranah domestik dan kurang terlihat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.

Interpretasi tersebut menjadi penting karena penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa tidak adanya keluhan dari perempuan berarti tidak terdapat ketimpangan gender. Sebagian besar informan memang menyatakan bahwa tanggung jawab mengelola air merupakan bagian dari kehidupan keluarga dan diterima sebagai kewajiban bersama. Namun, dalam perspektif gender kontemporer, penerimaan terhadap pembagian kerja tradisional tidak secara otomatis mencerminkan kesetaraan substantif. Butler (1990) menjelaskan bahwa identitas dan peran gender dibentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara berulang sehingga berbagai bentuk pembagian kerja dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar meskipun sesungguhnya merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu, penerimaan perempuan terhadap tanggung jawab pengelolaan air perlu dipahami secara lebih kritis sebagai hasil interaksi antara nilai budaya, kebutuhan adaptasi ekologis, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, posisi perempuan dalam pengelolaan air dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, perempuan menunjukkan agensi ekologis melalui kemampuan mengelola sumber daya dan mengambil keputusan pada tingkat rumah tangga. Kedua, praktik tersebut merupakan bentuk adaptasi sosial, yaitu strategi kolektif masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan di tengah keterbatasan air. Ketiga, pembagian kerja yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama penyediaan air tetap mengindikasikan adanya ketimpangan struktural karena beban reproduktif lebih banyak dipikul oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Ketiga dimensi tersebut tidak saling meniadakan, melainkan berlangsung secara bersamaan dalam membentuk pengalaman perempuan di Dusun Tinjalas.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi Agarwal (1992) di India dan Nightingale (2011) di Nepal yang menunjukkan bahwa perempuan mengembangkan pengetahuan ekologis yang kuat melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, terdapat perbedaan penting. Di berbagai komunitas Asia Selatan, agensi perempuan sering berkembang melalui organisasi kolektif yang memperjuangkan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan publik. Sebaliknya, di Dusun Tinjalas agensi perempuan lebih banyak diwujudkan melalui penguatan ketahanan keluarga, pengelolaan sumber daya pada tingkat rumah tangga, dan pembangunan solidaritas komunitas. Dengan demikian, bentuk agensi perempuan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya tempat praktik tersebut berkembang.

Temuan ini memperkaya perspektif Feminist Political Ecology dengan menunjukkan bahwa ketahanan air rumah tangga bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam atau infrastruktur, tetapi juga oleh kapasitas perempuan dalam mengembangkan strategi adaptasi ekologis, membangun pengetahuan lokal, dan memperkuat modal sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola air di wilayah pedesaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga pada pengakuan terhadap pengetahuan, pengalaman, dan agensi perempuan sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Perspektif ini menempatkan perempuan bukan semata-mata sebagai penerima manfaat kebijakan (beneficiaries), melainkan sebagai aktor strategis dalam tata kelola lingkungan berbasis komunitas, sehingga keberhasilan pengelolaan air sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan pengalaman lokal perempuan ke dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan lingkungan.

Foto 3. Perempuan di Desa Tinjalias Mengambil Air di Sungai Hitam-Bukit Kejumus Berjarak 2-3 Km



Sumber: tribunBali.com, 2021

Budaya Lokal sebagai Ruang Negosiasi Gender dalam Tata Kelola Air

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan air di Dusun Tinjalias tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat Hindu Bali. Berbeda dengan pendekatan yang memandang pembagian kerja domestik semata-mata sebagai manifestasi relasi patriarkal, hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan air dibentuk melalui proses negosiasi antara nilai budaya, spiritualitas, kebutuhan ekologis, dan pengalaman hidup masyarakat. Dalam konteks tersebut, budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi ruang tempat masyarakat membangun strategi adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya air.

Filosofi Tri Hita Karana menjadi landasan penting dalam membentuk cara masyarakat memaknai hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Konsep ini menempatkan harmoni sebagai prinsip utama kehidupan sehingga pemanfaatan sumber daya alam, termasuk air, harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam praktik sehari-hari, nilai tersebut tercermin pada kebiasaan masyarakat menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan sumber mata air, serta memanfaatkan air hujan sebagai bentuk penghormatan terhadap sumber daya yang terbatas. Bagi perempuan, praktik tersebut bukan sekadar aktivitas domestik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga keberlanjutan kehidupan keluarga dan komunitas.

Selain Tri Hita Karana, konsep *rwa bhineda* turut memengaruhi cara masyarakat memahami pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Dalam tradisi Bali, perbedaan tidak dipahami sebagai hubungan yang saling mendominasi, melainkan sebagai pasangan yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Perspektif ini menjelaskan mengapa sebagian besar informan tidak memaknai tanggung jawab perempuan dalam pengelolaan air sebagai bentuk ketidakadilan, tetapi sebagai bagian dari mekanisme kerja sama keluarga. Namun demikian, penelitian ini tidak menginterpretasikan pandangan tersebut sebagai bukti bahwa relasi gender telah sepenuhnya setara. Sebaliknya, penerimaan terhadap pembagian kerja domestik dipahami sebagai hasil negosiasi yang dipengaruhi oleh nilai budaya, pengalaman ekologis, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Interpretasi tersebut sejalan dengan kritik terhadap *cultural ecofeminism*, yang mengingatkan bahwa hubungan perempuan dengan alam tidak boleh dipahami secara esensialis seolah-olah perempuan memiliki sifat alamiah sebagai penjaga lingkungan (Plumwood, 1993). Apabila hubungan tersebut hanya dijelaskan melalui simbol budaya, analisis berisiko mengabaikan struktur sosial yang menyebabkan perempuan memikul tanggung jawab reproduktif lebih besar dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa kedekatan perempuan dengan pengelolaan air merupakan hasil interaksi antara nilai budaya dan pembagian kerja sosial, bukan konsekuensi biologis ataupun spiritual semata. Perspektif ini memungkinkan pembacaan yang lebih kritis terhadap praktik budaya tanpa mengabaikan makna yang diberikan masyarakat terhadap pengalaman mereka sendiri.

Foto 4. Sumber Pengambilan Air bagi Perempuan Dusun Tinjalias (2022)



Dalam konteks tersebut, budaya lokal justru menjadi ruang negosiasi gender. Perempuan tidak sekadar menjalankan peran yang telah ditentukan oleh norma sosial, tetapi secara aktif menafsirkan dan mengembangkan strategi agar tanggung jawab tersebut dapat dijalankan secara efektif. Mereka menentukan prioritas penggunaan air ketika pasokan terbatas, mengembangkan kebiasaan hemat air di lingkungan keluarga, serta mentransmisikan nilai-nilai konservasi kepada anak-anak. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang untuk membangun agensinya di dalam struktur budaya yang ada, bukan semata-mata melalui penolakan terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, agensi perempuan diwujudkan melalui kemampuan mengelola sumber daya, memperkuat solidaritas keluarga, dan menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kerangka nilai budaya yang mereka yakini.

Temuan ini memiliki perbedaan dengan berbagai penelitian di Asia Selatan dan Afrika yang menunjukkan bahwa agensi perempuan sering berkembang melalui organisasi kolektif atau gerakan sosial yang memperjuangkan akses terhadap sumber daya alam (Agarwal, 1992; Maathai, 2009). Di Dusun Tinjalas, penguatan peran perempuan lebih banyak berlangsung melalui praktik keseharian pada tingkat rumah tangga dan komunitas adat. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk agensi perempuan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya sehingga tidak dapat diukur hanya berdasarkan indikator partisipasi formal dalam pengambilan keputusan publik. Dengan kata lain, praktik konservasi yang dilakukan perempuan di Dusun Tinjalas merepresentasikan bentuk agensi kontekstual, yaitu kemampuan memengaruhi tata kelola sumber daya melalui tindakan sehari-hari yang menopang keberlangsungan keluarga dan masyarakat.

Meskipun demikian, pendekatan budaya tidak boleh digunakan untuk menutupi adanya ketimpangan pembagian kerja. Fakta bahwa perempuan tetap memikul tanggung jawab utama dalam memperoleh dan mengelola air menunjukkan bahwa beban reproduktif belum sepenuhnya terdistribusi secara seimbang. Oleh karena itu, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal perlu diiringi dengan upaya

memperluas partisipasi laki-laki dalam pengelolaan air rumah tangga. Pendekatan tersebut memungkinkan pelestarian budaya tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip keadilan gender.

Secara teoretis, temuan ini memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan air di Dusun Tinjalas tidak dapat dijelaskan hanya melalui perspektif patriarki maupun cultural ecofeminism. Sebaliknya, hubungan perempuan dengan lingkungan dibentuk melalui proses negosiasi yang menghubungkan pengalaman ekologis, nilai budaya, spiritualitas, dan pembagian kerja domestik. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa ekofeminisme dalam konteks Bali memiliki karakter hibrida, yaitu mengintegrasikan dimensi material, kultural, dan politik-ekologis dalam menjelaskan hubungan antara perempuan dan lingkungan. Perspektif ini memperluas diskursus ekofeminisme internasional dengan menunjukkan bahwa budaya lokal tidak hanya menjadi latar sosial, tetapi juga menjadi mekanisme yang membentuk strategi adaptasi, agensi perempuan, dan tata kelola sumber daya alam pada tingkat komunitas.

Foto 5. Perempuan Mengambil Air Bantuan dari Pemerintah Daerah



Sumber: Yunda Ariesta, 2023

Pelestarian Lingkungan, Keadilan Ekologis, dan Tata Kelola Air Berkelanjutan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan air di Dusun Tinjalas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui berbagai strategi konservasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penghematan penggunaan air, pemanfaatan air hujan, perlindungan sumber mata air, serta

penggunaan air secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan mencerminkan bentuk konservasi berbasis komunitas yang tumbuh dari pengalaman menghadapi keterbatasan ekologis. Praktik tersebut menunjukkan bahwa konservasi lingkungan tidak selalu lahir dari kebijakan formal, tetapi juga berkembang melalui pengetahuan lokal dan tindakan keseharian masyarakat yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Dalam perspektif keadilan ekologis (environmental justice), distribusi manfaat dan beban lingkungan sering kali tidak dialami secara setara oleh seluruh anggota masyarakat (Schlosberg, 2007). Masyarakat yang hidup di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur air menghadapi beban ekologis yang lebih besar dibandingkan masyarakat dengan akses air yang memadai. Di Dusun Tinjalas, kondisi tersebut terutama dirasakan oleh perempuan karena mereka bertanggung jawab terhadap penyediaan air bagi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, kelangkaan air tidak hanya merupakan persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan distribusi tanggung jawab sosial yang dipengaruhi oleh relasi gender. Perspektif ini memperlihatkan bahwa upaya mewujudkan keadilan ekologis memerlukan pengakuan terhadap pengalaman dan kontribusi perempuan sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya air.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak merespons keterbatasan air melalui konflik sosial, melainkan melalui penguatan ketahanan sosial-ekologis (social-ecological resilience). Solidaritas dalam berbagi informasi mengenai ketersediaan air, pengaturan penggunaan air secara kolektif, serta kebiasaan saling membantu pada musim kemarau memperlihatkan bahwa modal sosial menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Perempuan memainkan peran sentral dalam proses tersebut karena mereka tidak hanya mengelola kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga mentransmisikan pengetahuan konservasi kepada anggota keluarga dan memperkuat praktik-praktik kolektif yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Temuan ini memperkuat pandangan Folke et al. (2016) bahwa ketahanan sosial-ekologis dibangun melalui kemampuan komunitas

mengintegrasikan pengetahuan lokal, pembelajaran sosial, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Implikasi penelitian ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 5 (*Gender Equality*) dan Tujuan 6 (*Clean Water and Sanitation*). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan akses terhadap air bersih tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam tata kelola sumber daya air. Oleh karena itu, kebijakan penyediaan air bersih di wilayah pedesaan perlu mengintegrasikan pendekatan gender-responsive water governance, yaitu tata kelola yang melibatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, memanfaatkan pengetahuan lokal mereka, dan memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi perubahan iklim. Pendekatan tersebut juga selaras dengan prinsip Integrated Water Resources Management (IWRM) yang menekankan keterpaduan antara aspek ekologis, sosial, dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air (Global Water Partnership, 2020).

Transferability

Sebagai penelitian kualitatif yang dilakukan pada dua puluh rumah tangga di Dusun Tinjalas, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik. Kontribusi utamanya terletak pada transferabilitas konseptual, yaitu kemampuan temuan untuk menjelaskan fenomena serupa pada komunitas pedesaan yang memiliki karakteristik ekologis, sosial, dan budaya yang sebanding (Lincoln & Guba, 1985). Karakteristik geografis berupa wilayah perbukitan, keterbatasan akses terhadap air, serta kuatnya nilai-nilai budaya lokal membentuk konteks yang khas. Oleh karena itu, penerapan hasil penelitian pada wilayah lain memerlukan pertimbangan terhadap perbedaan kondisi ekologis, agama, budaya, dan sistem kelembagaan. Penelitian komparatif di berbagai komunitas pedesaan Indonesia maupun negara berkembang lainnya akan memperkaya pemahaman mengenai variasi praktik ekofeminisme dalam tata kelola sumber daya air.

Kontribusi Teoretis Penelitian

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan kajian ekofeminisme. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan air di masyarakat pedesaan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan teoretis. Pengalaman perempuan di Dusun Tinjulas memperlihatkan bahwa material ecofeminism, cultural ecofeminism, dan Feminist Political Ecology saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara perempuan, lingkungan, dan tata kelola sumber daya air. Kedua, penelitian ini menawarkan pembacaan yang lebih kritis terhadap relasi gender dengan menunjukkan bahwa penerimaan perempuan terhadap pembagian kerja domestik tidak secara otomatis mencerminkan kesetaraan maupun subordinasi. Temuan penelitian lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi antara agensi ekologis, strategi adaptasi sosial, dan struktur sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga, penelitian ini mengusulkan konsep ekofeminisme kontekstual berbasis budaya lokal, yaitu perspektif yang memandang praktik ekologis perempuan sebagai hasil interaksi antara pengalaman material, nilai budaya, spiritualitas, dan pembagian kerja domestik. Konsep tersebut memperluas diskursus ekofeminisme internasional yang selama ini lebih banyak dibangun berdasarkan pengalaman masyarakat di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin dengan menghadirkan perspektif masyarakat Hindu Bali.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pengelolaan air bersih di Dusun Tinjulas tidak hanya mencerminkan strategi adaptasi terhadap krisis ekologis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perempuan membangun ketahanan rumah tangga, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mentransmisikan nilai-nilai konservasi melalui praktik kehidupan sehari-hari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola air berkelanjutan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, budaya, dan gender secara simultan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pengguna sumber daya air, tetapi sebagai aktor strategis dalam mewujudkan

keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan berbasis komunitas.

SIMPULAN

Perempuan di Dusun Tinjulas memegang peranan sentral dalam pengelolaan air bersih melalui aktivitas memperoleh, mendistribusikan, menghemat, dan menjaga keberlanjutan pemanfaatan air bagi kebutuhan rumah tangga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sekadar merupakan pembagian kerja domestik, tetapi merupakan strategi adaptasi sosial-ekologis yang memungkinkan rumah tangga bertahan di tengah keterbatasan sumber daya air. Dengan demikian, perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pengguna sumber daya, tetapi juga sebagai aktor utama yang membangun ketahanan air rumah tangga (*household water security*) melalui pengetahuan lokal, pengambilan keputusan, dan praktik konservasi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis menggunakan perspektif material ecofeminism, cultural ecofeminism, dan Feminist Political Ecology memperlihatkan bahwa hubungan perempuan dengan pengelolaan air dibentuk oleh interaksi antara pengalaman material akibat kelangkaan air, pembagian kerja domestik, serta nilai budaya dan spiritualitas masyarakat Hindu Bali. Oleh karena itu, kedekatan perempuan dengan lingkungan tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi biologis maupun semata-mata sebagai konstruksi budaya, tetapi sebagai hasil negosiasi yang berlangsung antara kondisi ekologis, struktur sosial, dan nilai-nilai lokal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerimaan perempuan terhadap tanggung jawab pengelolaan air tidak secara otomatis mencerminkan kesetaraan ataupun subordinasi gender. Sebaliknya, pengalaman tersebut lebih tepat dipahami sebagai interaksi dinamis antara agensi ekologis, strategi adaptasi sosial, dan struktur sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekofeminisme dengan menunjukkan bahwa praktik pengelolaan air di masyarakat pedesaan Bali lebih tepat dijelaskan melalui integrasi material ecofeminism, cultural ecofeminism, dan Feminist Political Ecology daripada

menggunakan salah satu perspektif secara terpisah. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengusulkan konsep ekofeminisme kontekstual berbasis budaya lokal, yaitu perspektif yang memandang praktik ekologis perempuan sebagai hasil interaksi antara pengalaman material, nilai budaya, spiritualitas, dan relasi gender dalam tata kelola sumber daya air. Konsep ini memperluas diskursus ekofeminisme yang selama ini lebih banyak berkembang dari pengalaman masyarakat di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin dengan menghadirkan konteks masyarakat Hindu Bali.

Secara praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya menempatkan perempuan sebagai aktor strategis dalam tata kelola sumber daya air di wilayah pedesaan. Kebijakan penyediaan air bersih hendaknya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kapasitas perempuan, kelembagaan lokal, dan pelestarian pengetahuan ekologis masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals*, khususnya Tujuan 5 (*Gender Equality*) dan Tujuan 6 (*Clean Water and Sanitation*), yang menekankan pentingnya tata kelola sumber daya air yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu komunitas pedesaan dengan karakteristik geografis, budaya, dan keagamaan yang spesifik. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih bersifat transferabel secara konseptual daripada dapat digeneralisasikan secara statistik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan komparatif pada berbagai komunitas pedesaan dengan karakteristik sosial-ekologis yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi praktik ekofeminisme dan tata kelola sumber daya air dalam konteks perubahan lingkungan dan perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, B. (1992). The gender and environment debate: Lessons from India. *Feminist Studies*, 18(1), 119–158.

Alaimo, S., & Hekman, S. (Eds.). (2008). *Material feminisms*. Indiana University Press.

Bagayoko, T., et al. (2018). Water access and household resilience in rural communities. *Water Policy*, 20(4), 715–730.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE.

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.

Folke, C., Biggs, R., Norström, A. V., Reyers, B., & Rockström, J. (2016). Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*, 21(3), 41.

Fraser, N. (2016). Contradictions of capital and care. *New Left Review*, 100, 99–117.

Gaard, G. (2011). Ecofeminism revisited: Rejecting essentialism and re-placing species in a material feminist environmentalism. *Feminist Formations*, 23(2), 26–53.

Global Water Partnership. (2020). *Integrated water resources management*. Global Water Partnership.

Harcourt, W., & Nelson, I. L. (Eds.). (2015). *Practising feminist political ecologies: Moving beyond the “green economy”*. Zed Books.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.

Maathai, W. (2009). *The challenge for Africa*. Pantheon Books.

Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE.

Nightingale, A. J. (2011). Bounding difference: Intersectionality and the material production of gender, caste, class and environment in Nepal. *Geoforum*, 42(2), 153–162.

Plumwood, V. (1993). *Feminism and the mastery of nature*. Routledge.

Prihatiningtyastuti, E., Dayaram, K., & Burgess, J. (2020). "Women's Role in Water Management: A Tale of Two Villages." Dalam K. Dayaram, L. Lambey, T. Afrianti, & J. Burgess (Eds.), *Developing the Workforce in an Emerging Economy*, hlm. 68–82. Routledge.

- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (Eds.). (1996). *Feminist political ecology: Global issues and local experiences*. Routledge.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Shiva, V. (1988). *Staying alive: Women, ecology and development*. Zed Books.
- Sultana, F. (2021). Climate change, COVID-19, and the co-production of injustices: A feminist reading of overlapping crises. *Social & Cultural Geography*, 22(4), 447–460.
- Towa, E., Zeller, V., & Achten, W.M.J. (2021). "Circular economy scenario modelling using a multiregional hybrid input-output model: The case of Belgium and its regions." *Sustainable Production and Consumption*, 27, 889–904.
- Wismar'ain, D., Widjanarko, M., & Alyna, R. (2009). "Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 2(2), 50–60. ISSN: 1979-6889.
- World Health Organization. (2021). *Guidelines on sanitation and health*. World Health Organization.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.